

Judul : Gubernur BI: Redenominasi Butuh Waktu Lama, Kini Belum Jadi Fokus
Tanggal : Kamis, 13 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

KEBIJAKAN MONETER

Gubernur BI: Redenominasi Butuh Waktu Lama, Kini Belum Jadi Fokus

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Bank Indonesia menyatakan wacana redenominasi rupiah tak akan dilakukan dalam waktu dekat. Berbagai kalangan mengingatkan, kebijakan redenominasi belum mendesak, perlu persiapan matang, dan mesti ditrungi reformasi sistem keuangan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menanggapi soal wacana redenominasi rupiah yang belakangan ini ramai dibicarakan.

Perry mengatakan, langkah redenominasi akan membutuhkan waktu. Saat ini, pemerintah dan Bank Indonesia masih lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi.

"Redenominasi itu memerlukan *timing* dan persiapan yang lebih lama. Kami saat ini lebih fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas," kata Perry di Jakarta.

Hal senada sempat disampaikan Menteri Keuangan Parbaya Yudhi Sadewa sesuai acara *street talk generasi* dalam rangka memperingati Dies Natalis Ke-71 Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11). Ia membantah redenominasi rupiah akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Itu kebijakan bank sentral dan nanti akan diterapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Enggak sekarang, enggak tahun depan," kata Parbaya dilansir Kompas.com.

Redenominasi uang adalah penyederhanaan nilai nominal rupiah atau jumlah digit pada pecahan (denominasi) rupiah tanpa mengubah nilai riilnya atau daya belinya. Dengan kata lain, redenominasi hanya mengubah angka yang tertulis pada uang, tetapi tidak mengubah nilai ekonominya.

Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1. Secara nominal berubah, tetapi Rp 1 tetap bisa dipakai untuk membeli barang yang sebelumnya seharga Rp 1.000.

Kebijakan redenominasi mata uang bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan efisiensi transaksi dalam sistem keuangan, memperkuat daya saing ekonomi, dan menjaga kredibilitas rupiah di mata

Redenominasi itu memerlukan *timing* dan persiapan yang lebih lama.

Perry Warjiyo

dunia.

Rencana redenominasi rupiah, hari-baru ini, muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Dalam aturan itu penyederhanaan nilai rupiah ditetapkan sebagai salah satu agenda penting yang ditargetkan rampung pada 2027.

Landasan hukumnya berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Belum mendesak

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafrudin Karimi menilai, redenominasi saat ini belum mendesak. Menurut dia, redenominasi tidak mendongkrak produktivitas ataupun menambah nilai dan berisiko menciptakan guncangan ekspektasi saat transisi.

Jika dilakukan dalam waktu dekat, kebijakan itu berisiko memicu gejolak ketidakpastian. Konsumen akan terjebak dalam ilusi uang dan bias angka lantaran merasa harga lebih murah. "Angka mengecil, lalu permintaan melonjak, sementara pasokan tidak berubah. Pedagang terdorong membublatkan harga ke atas sehingga inflasi merayap," katanya.

Redenominasi juga berisiko menimbulkan salah *interpretasi* akuntansi, sengketa kontrak, dan kebingungan tagihan, termasuk gaji serta pajak.

Syafruddin mengatakan, fondasi makroekonomi perlu diperhatikan ketika hendak menerapkan redenominasi. Hal ini meliputi inflasi inti yang stabil, ekspektasi inflasi terjangkau, disiplin fiskal ke-

dibel, kecukupan cadangan devisa terjaga, serta likuiditas perbankan yang memadai.

Lalu, perlu disiapkan pula kerangka hukum yang otomatis mengonversi seluruh kontrak, piutang dan utang, serta tarif tanpa ruang tafsir. Pengujian konversi mata uang pun perlu dilakukan dalam sistem keuangan sembari memberikan komunikasi dan edukasi ke publik, termasuk kanal *hot-line* dan bantuan penginjian sistem bagi pelaku usaha.

"Dalam timbangan biaya-manafaat saat ini, kebutuhan redenominasi tidak mendesak. Energi kebijakan lebih tepat diarahkan pada penguatan daya saing dan lonjakan produktivitas agar perekonomian benar-benar bisa berlari pada lintasan 8 persen dengan stabil," ucapnya.

Sementara ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpandangan, redenominasi baru akan sukses jika dijadikan momentum untuk transformasi sektor keuangan. Jika tidak diiringi reformasi dan transformasi, dampaknya sulit maksimal.

"Redenominasi yang sukses biasanya dimanfaatkan sebagai momentum transformasi. Bagi Indonesia, ini bisa jadi momentum literasi publik untuk berantas judi *online*, juga terkait uang digital. Bisa jadi momentum berantas peredaran uang palsu," katanya.

Head of Asia Pacific (ex China) and Global Head of Central Banks di World Gold Council Shaokai Fan berpendapat, redenominasi rupiah tidak akan berdampak langsung terhadap ekonomi, termasuk pergerakan harga emas. Alasannya, kebijakan redenominasi hanya sebatas memangkas angka 0 dalam mata uang.

"Akan tetapi, mungkin memang ada dampak sekunder yang dapat ditimbulkan (dari redenominasi), antara lain dari sisi kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia," katanya di Jakarta.

Di sisi lain, kebijakan redenominasi juga dapat menjaga laju inflasi tetap stabil. Maka, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan juga naik sehingga minat masyarakat terhadap emas pun ikut meningkat. (AGP/AGP)